AKTOR TRANSMIGRASI BURU:
Studi Pembangunan Pertanian oleh Program Transmigrasi di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Naomi S.M Lesbatta*; Pamerdi Giri Wiloso; Widhi Handayani
Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin,
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Email*: sintia.melwin@gmail.com

ABSTRAK

Program transmigrasi Buru membawa perubahan pembangunan terhadap Waeapo yang terlihat dari keberhasilan pembangunan yang ditunjukan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memngetahui aktor transmigrasi dalam pembangunan pertanian oleh program transmigrasi di kecamatan Waeapo, kabupaten Buru, provinsi Maluku dan menjelaskan pembangunan pertanian pada pulau Buru yang dilakukan oleh transmigran dalam kerjasama dengan masyarakat lokal dan pemerintah. Metode penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ada kolaborasi antar aktor, yaitu pemerintah, transmigran, penduduk lokal dan hutan serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Waeapo, kabupaten Buru. Hadirnya transmigran dengan bantuan teknologi membawa perubahan terhadap lingkungan Waeapo meliputi alih fungsi hutan sebagai ekosistem alami menjadi ekosistem buatan (sawah). Selain itu, terjadi pula perubahan sosial terjadi seperti pertambahan penduduk, ekonomi, keragaman budaya, tranformasi pangan dan perubahan lingkungan fisik.

Kata kunci: aktor, pembangunan berkelanjutan, transmigrasi, pertanian, Kabupaten Buru

ABSTRACT

The Buru transmigration program has brought about changes in the development of Waeapo which can be seen from the success of the development. This study aims to identify transmigration actors in the agricultural development by transmigration program in Waeapo sub-district, Buru district, Maluku province, and explain agricultural development on Buru island carried out by transmigrants in collaboration with local communities and the government. A descriptive qualitative method by in-depth interviews, observation and documentation to collect the data was conducted to achieve

the aim of the research. The results of the study show that there is collaboration between actors, namely the government, transmigrants, local residents and the forest as well as the technology used in the development of the agricultural sector in Waeapo District, Buru district. The presence of transmigrants, by the role of technology, brought changes to the Waeapo environment including the conversion of the forest as natural ecosystem to artificial ecosystem (paddyfields). Furthermore, social changes also occurred such as population growth, economy, cultural diversity, food transformation and changes in the physical environment.

Keywords: actor, sustainable development, transmigration, agriculture, Buru Regency

PENDAHULUAN

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah yang padat penduduknya kewilayah yang masih sedikit penduduknya. Program transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kependudukan, serta mengupayakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan (Hardjono,1982 *dalam* Nova, 2016). Kehadiran program tersebut pada akhirnya mengubah daerah tujuan dalam arti membawa perubahan pada kondisi fisik maupun tatanan sosial budaya di daerah tujuan. Di Indonesia, transmigrasi pernah terjadi di berbagai daerah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya (Nova, 2016). Di Kalimantan, transmigrasi pernah dilaksanakan pada Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah tujuannya (Firmansyah, 2018). Selain itu, Pulau Buru juga pernah menjadi daerah tujuan transmigrasi yang menempati dataran Waeapo sejak tahun 1980.

Sebagai program pemerintah untuk mengembangkan daerah-daerah terpencil dan meningkatkan perekonomian, kehadiran transmigrasi berperan penting dalam pembangunan wilayah. Selain itu, kebijakan pemerintah tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antara wilayah satu dengan yang lainnya (Harmadi dan Antarwati, 2014). Guna meningkatkan pembangunan dan pemerataan ekonomi, kebijakan pemerintah lebih diarahkan pada bidang pertanian (Febriani *et al.*, 2020). Upaya mengembangkan bidang pertanian dilakukan dengan penerapan usaha tani berupa penyediaan bibit unggul, pemupukan, pengairan yang baik, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, serta metode bercocok tanam yang baik.

Kabupaten Buru merupakan pulau penghasil pangan di Provinsi Maluku saat ini. Buru dikatakan sebagai lumbung pangan Maluku karena setiap tahun kabupaten Buru memproduksi ribuan ton padi seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi padi oleh Kabupaten Buru tahun 2009-2012

Tahun	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
2009	10.966	45.620	41,60
2010	10.966	46.386	42,30
2011	11.742	52.500	44,70
2012	10.425	48.168,5	46,20

Sumber: BPS Kabupaten Buru (2013: 139)

Menurut BPS Kabupaten Buru (2018), luas panen padi pada tahun 2016 mencapai 9.406 hektar dan tahun 2017 mengalami peningkatan dengan luas mencapai 11.241 hektar, atau meningkat 19,51% dari tahun 2016. Tabel 1 menunjukkan luas panen, produksi padi, serta produktivitas padi di Kabupaten Buru pada 2009-2012. Tampak pada Tabel 1 tersebut, bahwa produksi padi di Kabupaten Buru cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2012 menurun produksinya dibandingkan tahun 2011. Namun, penurunan produksi ini berkaitan dengan luas lahan panen yang juga menurun di 2012 dibandingkan 2011. Jika dibandingkan, dari 2009-2012, tampak bahwa produktivitas padi di Kabupaten Buru terus meningkat.

Di antara seluruh kecamatan di Kabupaten Buru, salah satu kecamatan yang produksi padinya paling besar adalah Waeapo. Duwila (2015) menulis bahwa sejak 2003-2012, produksi padi di Waeapo terus meningkat. Menurut BPS Kabupaten Buru (2018), luas panen padi Kecamatan Waeapo pada 2017 mencapai 6.570 hektar atau 58,45% dari luas panen Kabupaten Buru. Selain itu, produksi padi yang dihasilkan Kecamatan Waeapo sebesar 4,85 ton/ha adalah yang terbanyak di Kabupaten Buru. Menilik sejarahnya, produksi padi di Kecamatan Waeapo tidak terlepas dari peran transmigran yang mengembangkan sistim pertanian padi sawah.

Sejak 1980, Waeapo bukan saja ditinggali oleh penduduk lokal, tetapi juga ditinggali oleh transmigran Jawa. Kehadiran pendatang di suatu wilayah bisa saja menimbulkan konflik antar etnis, sebagai risiko atas kemajemukan suku dan budaya yang dimiliki (Kalsum, 2015). Sebagai contoh, konflik yang terjadi di Jambi saat masuknya transmigran pada tahun 1990-an mengguncang stabilitas, diikuti tuntutan masyarakat meminta pengembalian tanah (Lindayanti *et al*, 2015). Ini berbeda dengan kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. Keberhasilan Waeapo dalam sektor pertanian hingga menjadi lumbung pangan Provinsi Maluku menunjukkan kerja sama yang sinergis antara transmigran, masyarakat

lokal dan pemerintah. Kerja sama yang sinergis tersebut menunjukkan tidak adanya atau rendahnya konflik antar etnis di kecamatan Waeapo sampai saat ini.

Sesuai dengan penjelasan diatas aktor-aktor pembangunan Waeapo merupakan bagian dari jaringan aktor secara kolektif. Maka, teori yang digunakan, yaitu *Actor Network Theory* (ANT) akan relevan dengan aksi kolektif antara transmigran, penduduk lokal dan pemerintah dalam upaya membangun pertanian Waeapo. ANT merupakan teori yang memfokuskan jejaring antar aktor dengan menjelaskan hubungan aktor dan aktan. Teori ini tidak hanya bertitikberat pada relasi antarmanusia tetapi juga terhadap relasi manusia dengan aktor nonmanusia, seperti alam dan lingkungan hidup (Hapsari *et al*, 2017).

Dengan gambaran permasalahan yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah "Bagaimana pembangunan pertanian pada pulau Buru yang dilakukan oleh transmigran dalam kerjasama dengan masyarakat lokal dan pemerintah?" Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian di pulau Buru yang dilakukan oleh transmigran dalam kerjasama dengan masyarakat lokal dan pemerintah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif karena memberikan penggambaran yang jelas mengenai subjek dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini melibatkan pemerintah yaitu kepala desa yang ada di setiap desa di kecamatan Waeapo. Jumlah informan adalah dua puluh tiga orang terdiri dari tujuh orang kepalah desa, sepuluh orang transmigran Jawa Sembilan orang laki-laki, satu orang transmigran perempuan, serta enam orang penduduk lokal. Peneliti menentukan informan ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang tingal di kecamatan Waeapo.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu wawancara dilakukan 120 menit untuk setiap informan. Ada beberapa informan yang diwawancarai dua kali, dan ada yang satu kali. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati lokasi penelitian dan melakukan dokumentasi saat melakukan wawancara dengan informan. Hasil wawancara dicatat untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *Actor Network Theory* (ANT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waeapo merupakan Kecamatan yang ada di Kabupaten Buru. Adapun batas wilayah Kecamatan Waeapo yaitu: Sebelah utara Kecamatan Namlea, sebelah selatan: Kecamatan Waelata, sebelah barat: Kecamatan Lolongkuba. Secara topografi kecamatan Waeapo berada pada dataran rendah dan berawa-rawa. Luas Waeapo 14.000 Ha dengan gunung dan sungai (BPS Kecamatan Waeapo, 2018).

Pembangunan yang dikembangkan di wilayah Waeapo merupakan pembangunan pada sektor pertanian. Salah satu komoditas pertanian yang dikembangkan di Waeapo adalah padi yang sebelumnya sudah dibudidayakan oleh transmigran. Program transmigrasi hadir di Waeapo pada tahun 1980 dan berakhir pada tahun 1982.

Perjalanan transmigran dari pulau Jawa menuju pulau Buru dilakukan dengan menggunakan kapal laut. Setelah tiba di Buru, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan mereka yaitu dataran Waeapo. Mereka melewati muara sungai Waeapo dan sampai pada sungai kaki air mendidi turun setelah itu mereka berjalan kaki masuk unit-unit yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Kondisi Waeapo saat itu masih berupa hutan, meskipun sebagian dari lahan Waeapo sudah dibabat oleh eks-tapol (mantan tahanan politik 1965) yang menggarap lahan sawah sebelumnya (Lesbatta *et al*, 2021). Perumahan transmigran pada saat itu belum ada, sehingga setibanya di Waeapo, sementara mereka menempati rumah bekas eks-tapol yang sangat terbatas. Setelah itu, dengan berjalannya waktu perumahan transmigran dibuat oleh kontraktor dalam bentuk rumah bertiang kayu, berdinding papan dan beratap daun rumbia.

> "Kondisi perumahan transmigran kurang begitu baik sehingga isi rumah itu bekas rawa-rawa jadi ada airnya sehingga kami mengalas lantai mengunakan karpet (parlak) untuk bisa tidur. Setelah itu kami merenovasi sendiri untuk lebih nyaman ditempati" (Tono, transmigran, wawancara tahun 2019)

Transmigran juga diberikan jatah makanan dari pemerintah selama satu tahun. Aktivitas transmigran saat itu ada yang memancing ikan, mencari makanan tambahan dan yang memiliki keterampilan lain yang bisa dikembangkan seperti servis jam tangan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran saat itu untuk mengisi waktu setiap hari mereka. Lokasi tempat tinggal transmigran juga berdekatan dengan penduduk lokal sehingga mereka membangun interaksi dengan cara saling menyapa, selain melalui interaksi jual beli antara penduduk lokal dan transmigran.

Setahun kemudian transmigran diberikan jatah lahan oleh pemerintah. Mereka mendapatkan jatah lahan seluas dua hektar untuk setiap keluarga. Jatah lain juga diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa ternak seperti sepasang ayam dan sapi untuk dipelihara oleh transmigran. Awalnya, sawah yang tersedia pada saat itu baru enam puluh dua hektar saja, sehingga dilakukan pengundian untuk menentukan lokasi lahan yang akan diperoleh tiap keluarga. Akhirnya, dapat ditentukan bahwa tiap kepala keluarga diberikan satu hektar sawah, tiga perempat ladang, dan pekarangan seperempat hektar jadi jumlah luasannya adalah dua hektar. Bibit padi dan jagung disediakan oleh pemerintah dan diberikan kepada transmigran.

Setelah mendapat lahan, transmigran mulai mengolah lahan dengan cara membersihkan areal lahan terlebih dahulu setelah itu mulai membuat sawah. Pembukaan sawah memakan waktu yang cukup lama karena saat itu belum tersedia piranti yang canggih. Piranti yang dipakai saat itu hanya seadanya seperti, cangkul, golok dan kapak.

> "Di Wilayah Waeapo tidak secara menyeluruh bekas sawah ada juga yang masih hutan. Transmigran masuk membuka areal sawah baru. Memang ada bekas sawah milik eks tapol tetapi sudah tertutup rumput. Maka masuk PT Muria untuk pembabatan hutan." (Laim, transmigran, wawancara tahun 2019)

Dalam penggarapan lahan sawah transmigran juga pernah mengalami gagal panen. Gagal panen disebabkan oleh musim kemarau panjang selama enam bulan pada tahun 1989. Masyarakat transmigran pada saat itu beralih mengonsumsi sagu seperti penduduk lokal. Interaksi antar transmigran dan penduduk lokal juga terjadi melalui gagal panen, yaitu ketika transmigran beralih mengonsumsi pangan lokal Buru dan mengikuti penduduk dalam menyuling Kayu Putih untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama.

Saat itu, penduduk lokal Waeapo juga mendapatkan makanan mereka dengan cara bercocok tanam. Alat yang dipakai untuk bercocok tanam adalah kapak dan golok dan tanaman yang dibudidayakan yaitu padi gogo, singkong, *hotong* - *Setaria italica* (L.) Beauv, sejenis padi yang mirip alang-alang, tumbuh di semua jenis lahan baik dataran rendah maupun dataran tinggi, dan merupakan pangan alternatif pengganti beras yang dimanfaatkan masyarakat Pulau Buru sehingga disebut sebagai *Buru Hotong* (Herodian, 2008) dan lain-lainnya. Biasanya, hasil mereka bercocok tanam tersebut dijual ke Namlea dan ada juga penduduk lokal yang menawarkan barang kepada para transmigran. Selain itu, penduduk lokal saat itu sudah menyuling minyak kayu putih secara tradisional untuk dijual ke Namlea, dan bahkan ke kota Ambon.

Guna meningkatkan produktivitas padi, pemerintah membangun jaringan dengan penduduk lokal dan transmigran. Dinas Pertanian Kabupaten Buru, bahkan Dinas Pertanian Provinsi, dikerahkan untuk membekali penduduk lokal dan transmigran dengan berbagai pengetahuan di bidang pertanian. Harapannya, penyuluhan yang diberikan akan bisa mengembangkan komoditas pertanian mereka. Pemerintah pada saat itu melakukan upaya modernisasi sistim usaha tani untuk meningkatkan produksi padi sawah melalui revolusi hijau. Program revolusi hijau secara nasional, dilakukan melalui program panca usaha tani secara seragam di semua desa yang ada pada wilayah Indonesia. Program panca usaha tani meliputi (1) penyediaan bibit padi unggul, (2) pemupukan anorganik, (3) obat-obatan untuk membasmi hama, (4) pembangunan sistim irigasi dan, (5) perbaikan pola tanaman padi sawah (Iskandar, 2016).

Penerapan panca usaha tani yang dilakukan pada wilayah Waeapo telah menyebabkan perubahan pada petani sawah di wilayah Waeapo. Petani mulai menggantikan padi lokal dengan padi bibit unggul. Proses perawatan tanaman padi juga sudah menggunakan pupuk dan obat-obatan untuk mengusir hama serta penyakit tumbuhan. Hadirnya irigasi yang dibangun lebih modern lebih mudah untuk mengairi sawah, pola bercocok tanam juga mengalami perubahan dalam cara pengolahan lahan sawah. Jika dulunya para petani menggunakan ternak untuk membajak, kini mereka beralih menggunakan mesin untuk membajak sawah, memotong padi, dan menggiling padi.

Panen padi yang diperoleh dari transmigran membawa perubahan dari sebelumnya transmigran hanya mendapat jatah beras untuk bahan pangan, kini saatnya transmigran mulai memproduksi padi. Selain jenis pangan sudah berubah, penduduk lokal juga turut menikmati hasil dari panen padi yang diolah oleh transmigran sehingga terjadi pertukaran pangan lokal penduduk. Meskipun kehadiran transmigran untuk mendorong pertanian di Waeapo berjalan dengan baik, namun sempat terjadi kecemburuan sosial di Kecamatan Waeapo. Kecemburuan sosial dialami oleh penduduk lokal terhadap transmigran. Pada saat itu kecemburuan terhadap status desa dimana transmigrasi menjadi desa induk yang memiliki kewenangan mengatur penduduk lokal yang status desanya masih dusun.

> "Kecemburuan sosial terjadi antara desa Gogrea dan desa Waetele yang merupakan desa induk. Terpisah karena mereka merupakan penduduk adat yang ada pada kecamatan Waeapo, mereka harus menjadi desa karenan transmigran pendatang saja bisa mekar dan jadi desa kenapa kami penduduk asli tidak, sehingga kebijakan bupati memekarkan mereka sehingga tidak menimbulkan konflik antara etnis dalam kecamatan Waeapo." (Sen, penduduk lokal, wawancara tahun 2019).

Konflik antara etnis bukan persoalan baru di Indonesia. Tercatat ada beberapa wilayah yang menghadapi konflik, seperti yang terjadi di Jambi konflik yang timbul mengenai masalah tanah. Integrasi dan konflik di Jambi menunjukkan bahwa meskipun sebelumnya sudah terjadi integrasi di Jambi pada tahun 1970-2012 tetapi integrasi itu menimbulkan konflik karena berbagai persoalan. Persoalan yang menyebabkan konflik di Jambi terjadi adalah masyarakat setempat meminta pengembalian tanah (Lindayanti dan Zaiyardam, 2015). Berbeda dengan konflik yang terjadi di Jambi, di Waeapo konflik timbul dari kecemburuan sosial.

Namun demikian, kecemburuan sosial yang terjadi dalam kalangan masyarakat Waeapo tidak meluas karena ditangani secara baik oleh pemerintah setempat. Peristiwa itu tidak membawa dampak yang meluas sehingga dapat diselesaikan dengan cara membangun interaksi antara penduduk lokal, pemerintah dan transmigran sehingga masalah kecemburuan sosial dapat diatasi.

Konflik dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan, oleh karena itu penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di Waeapo. Terbukti, dengan diselesaikannya konflik, pembangunan pertanian di Waeapo dapat berlangsung dengan baik karena tidak ada kendala dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

Relasi antar aktor: Pendorong Keberhasilan Transmigrasi di Waeapo

Keberhasilan pembangunan pertanian di Waeapo merupakan kolaborasi antar aktor-aktor yang menyusun jejaring di dalamnya. *Actor Network Theory* menunjukkan bahwa semua elemen yang tergabung dalam sistim akan membentuk jaringan dengan secara alami (Hapsari *et al*., 2017). Aktor yang bisa mengontrol aktor lain disebut sebagai aktan dan aktanlah yang memiliki peran bergerak masuk dan keluar jaringan berdasarkan kepentingannya. Konsep *Actor Network Theory* bukan hanya membahas entitas manusia saja tetapi juga entitas non-manusia (Hapsari *et al*, 2017). Hubungan antar entitas, baik antar manusia maupun entitas manusia dengan non-manusia ditunjukkan melalui hubungan transmigran dan penduduk lokal dengan alam dimana mereka memanfaatkan hutan sebagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini, tampak bahwa aktor manusia dan non manusia saling berhubungan. Awalnya penduduk lokal mengandalkan hutan sebagai penyedia pangan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Pada tahap ini, tampak bahwa manusia bergantung pada hutan yang menyediakan pangan. Namun dengan berjalannya waktu, terjadilah perubahan. Jika awalnya hutan menjadi penyedia

utama pangan bagi manusia, dengan adanya teknologi seperti cangkul, dan parang manusia mengubah hutan menjadi sawah.

Interaksi antar manusia juga tampak dalam kehidupan transmigran, pemerintah, dan penduduk lokal. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu-individu maupun kelompok-kelompok manusia (Soekanto, 2014). Interaksi dibangun dalam kehidupan transmigrasi dan penduduk lokal melalui komunikasi antara satu dan yang lain maupun kelompok. Relasi yang dibangun oleh transmigrasi dan penduduk lokal merupakan jaringan relasi saling bergantung satu sama lain dalam membangun kerja sama. Relasi tersebut mencerminkan hubungan saling menerima percampuran budaya yang dianut masing-masing karena menyadari mereka saling membutuhkan satu dan yang lain, baik secara individu maupun kelompok.

Collective action merupakan tindakan kolektif dimulai dari kelompok orang yang berkumpul setelah itu mereka melakukan aksi atau tindakan secara bersama-sama (Wahyudi, 2005). Tindakan *Collective action* yang terjadi dalam lingkungan Waeapo terlihat saat transmigran dan penduduk lokal melakukan kegiatan pertanian dan penyulingan minyak kayu putih bersama dengan cara bergotong royong. Masyarakat masih menganut kuat nilai-nilai gotong royong yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti gotong royong tolong menolong maupun gotong royong dalam kerja bakti (Rostiyati, 2012).

Dalam perjalanannya, terjalin hubungan kerja sama antara transmigran dan penduduk lokal untuk mengembangkan pertanian Waeapo. Pengembangan usaha-usaha pertanian berupa sawah, sayuran dan buah-buahan, dan usaha dagang merupakan perbaikan yang dilakukan sebagai adaptasi untuk meningkatkan taraf hidup transmigran dan penduduk lokal Waeapo. Sistem pertanian Waeapo mulai beragam dalam kehidupan bersama mereka dan penduduk lokal mulai bekerja sama dengan transmigran dalam pengembangan sistem pertanian.

Menurut Wright (1990) *collective action* merupakan setiap tindakan bertujuan untuk dapat memperbaiki kondisi kelompok (semacam status atau kekuasaan) yang disahkan oleh perwakilan kelompok. Peran pemerintah (Dinas Pertanian) selalu mendampinggi transmigrasi dan penduduk lokal untuk melakukan sosialisasi menyangkut pertanian dan agar mereka lebih mandiri dan berkembang dalam sektor pertanian. Pemerintah juga memberikan bantuan seperti pupuk dan obat-obatan pengusir hama.

Sistem pertanian juga berperan menjadi aktor dalam swasembada pangan di Waeapo melalui penerapan panca usaha tani. Namun dalam prosesnya,

pengembangan pertanian di Waeapo tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu kendalanya adalah gagal panen. Perubahan hutan menjadi sawah menyebabkan sawah lebih mudah terserang hama, yaitu ulat dan keong. Oleh karena itu transmigran menggunakan obat-obatan untuk mengusir hama agar tidak terjadi gagal panen lagi.

Hadirnya sistem pertanian baru yang dikembangkan oleh transmigran membawa perubahan pada kehidupan penduduk lokal Waeapo. Ada berbagai-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transmigrasi, yaitu kelembagaan sosial, kesehatan dan keamanan (Rachman dan Noviarini 2018). Sedangkan keberhasilan transmigrasi Tanjung Buka Kabupaten Bulungan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, kemudahan pendidikan, dan fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan maupun fasilitas umum lainnya (Susanto, *et al*. 2019). Pada akhirnya, studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program transmigrasi di Waeapo dipengaruhi oleh kolaborasi antar pemerintah, transmigran, dan penduduk lokal sebagai aktor manusia, serta hutan dan teknologi sebagai aktor non manusia.

Kehidupan di Waeapo mengalami perubahan dari aspek sosial ekonomi, Bahasa, budaya, dan kesenian. Penerapan aspek tersebut membawa parubahan dalam kehidupan transmigrasi dan penduduk lokal yang hidup bersamaan dalam kecamatan Waeapo. Perubahan transportasi juga terjadi dalam kehidupan penduduk lokal semula mengunakan transportasi laut hadirnya transmigrasi jalan darat mulai terbuka yang menghubungkan kecamtan Waeapo dengan kota Namlea. Agama juga mengalami perubahan awalnya penduduk lokal masih menganut animisme kini beralih memeluk agama Islam dan Kristen yang berkembang dalam kehidupan transmigran dan penduduk lokal. tingkat pendidikan juga mulai berkembang awalnya penduduk dan transmigran memiliki tingkat pendidikan terbatas mulai berubah sistem pendidikam mulai berkembang dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Pembangunan pemukiman transmigrasi pada dasarnya akan mempengaruhi lingkungan baik secara biografik, sosial, ekonomi, dan budaya yang menimbulkan perubahan terhadap tatanan ekosistem alam serta kehidupan masyarakat lokal sekitar (Suwarno, 1997). Pembangunan Waeapo membawa perubahan pada lingkungan hidup terlihat dari kehidupan penduduk lokal, transmigran serta hutan. Hutan Waeapo mengalami pengikisan yang ditimbulkan oleh alih fungsi hutan menjadi areal pertanian, sawah, pemukiman dan infrastruktur. Sama dalam hal lahan Kalimantan mengalami kehilangan hutan disebabkan karena hutan dialihkan menjadi areal perkebuanan kelapa sawit dan perkebunan kayu pulp (Wahyudi dan Suranto 2021).

Pada satu sisi, kehadiran transmigran membawa dampak positif dalam hal pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Namun seperti dua sisi mata uang, pembangunan juga memiliki sisi negatif terlebih ketika dilakukan dengan mengeksploitasi ekosistem alami. Secara khusus alih guna lahan hutan di Waeapo menjadi areal persawahan membawa perubahan sifat ekosistem yang lebih beragam menjadi ekosistem yang lebih monokultur, sehingga akan berdampak secara negatif terhadap lingkungan hidup.

Hutan sagu mulai mengalami pengikisan, pangan lokal mulai bergeser yaitu padi gogo dan sagu mulai sulit ditemui dalam kalangan penduduk lokal Waeapo disebabkan karena perkembangan padi sawah yang meningkat sehingga penduduk beralih mengonsumsi padi sawah yang diolah menjadi nasi. Berbeda halnya dengan Merauke melalui proyek MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) dalam pengembangan perkebunan pangan dan energi terintegrasi terjadi eksplorasi hutan yang mempengaruhi tatanan demografi. Proyek tersebut mengundang kehadiran banyak pendatang, sehingga perubahan terjadi pada lingkungan, ekonomi, alih fungsi lahan dan demografi yang berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang tingal pada tapak proyek MIFEE. Penduduk asli tersingkir dalam arus pembangunan yang berdampak pada jarak sosial anatara penduduk asli dan pendatang (Fitriani et al, 2019).

Dampak perubahan iklim Waeapo juga terjadi dimana transmigrasi membuka hutan menjadi lahan sawah mengakibatkan pengaruh iklim juga ikut berubah seperti awalnya udaranya sejuk beralih menjadi panas karena kehilangan hutan. Menurut (Pagiola, 2000) perubahan iklim terjadi karena perubahan hutan menjadi karena pengolahan lahan dan penebangan kayu, sehingga membawah perubahan iklim mimiliki efek pada konferensi hutan mengakibatkan berkurangnya keragaman menghayati, pemanasan global, kerusakan fungsi huatan, penurunan kapasitas karbon, perubahan signifikan lapisan hydrogen (permukaan air dan tanah) dan hilangnya nilai estetika dan kesempatan rekreasi.

KESIMPULAN

Keberadaan transmigran pada kecamatan Waeapo membawa pembangunan dari segi pertanian dalam wilayah tersebut. Keberhasilan program transmigrasi di Waeapo dalam hal pertanian disebabkan oleh kolaborasi antar aktor, yaitu pemerintah, transmigrasi, penduduk lokal, hutan, dan teknologi. Alih guna hutan juga berdampak terhadap lingkungan karena terjadi pergeseran pada hutan alami Waeapo menjadi nonhutan yaitu persawahan. Selain itu, kehadiran transmigran juga membaawa perubahan sosial seperti bertambahnya

penduduk, pertanian yang beragam, perubahan lingkungan fisik, percampuran budaya dan peralihan pangan penduduk lokal dari sagu beralih menjadi pangan nasi dalam lingkungan Waeapo.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru. (2013). *Statistik Daerah Kabupaten Buru 2013*. Namlea: BPS Kabupaten Buru. ISSN 2301-8755.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru. (2018). *Statistik Daerah Kabupaten Buru 2018*. Namlea: BPS Kabupaten Buru. ISBN 978-602-0985-91-6.

Duwila, U. 2015. Pengaruh produksi padi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kecamatan Wae Apo, Kabupaten Buru. *Jurnal Cita Ekonomika*, 9 (2), 148-158.

Febrian R. Martini S. Yanuardi H. M, 2020. Kebijakan pemerintah dalam swasembada beras dan dampaknya bagi petani di Kabupaten Karawang 1969-1985. *Periode: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 2 (1), 51-65.

Firmansyah, A. 2018. Pengalaman transmigrasi di Indonesia (Studi di desa Olak-Olak, kecamatan Kubu, kabupaten Kubu Raya). *Jurnal Historia* 6 (2), 379-390.

Fitriani R.Y, Zait P, Nasution, Budi P.S, Salim.S.N.M, Zakaria Y, Wdjaya S, Nurdin V.B, Firdaus Y.A, Dharma F, Sumarja FX, Hartoyo, 2019. *Transformasi kebijakan agrarian dan transmigrasi di Indonesia.* Yogyakarta. Pustaka Ilmu. 108-139.

Hapsari. R. D, Billy K, Sarwono dan Eriyanto. 2017. Jaringan komunikasi dalam partisipasi gerakan sosial lingkungan: studi pengaruh sentralitas jaringan terhadap partisipasi gerakan sosial tolak pabrik semen pada komunitas adat Samin di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 4 (2), 127-126.

Harmadi, S.H.B dan Antarwati, E. 2014. Identifikasi transmigrasi berdasarkan karakteristik migran di Indonesia. *Jurnal Ketransmigrasian*. 31 (2), 1-14.

Herodian, S. 2008. Pengembangan Buru Hotong (*Setaria italica* (L) Beauv) Sebagai Sumber Pangan Pokok Alternatif. *Jurnal Pangan*. 17(3): 26-37. https://doi.org/10.33964/jp.v17i3.265

Iskandar, J. dan Iskandar, B, S. 2016. Etnoekologi dan pengolahan agroekosistem oleh penduduk desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Jawa Barat. *Jurnal Biodjati* 1(1), 1-10.

Kalsum, E. 2015. Model penelitian hubungan pola pemukiman dan konflik antara etnis. *Langkau Betang Jurnal Arsitektur* 2 (1), 77- 84

Lindayanty dan Zaiyardam, 2015. Konflik dan integrasi dalam masyarakat plural: Jambi 1970-2012. *Jurnal Paramita* 25 (2), 160-182.

Nova, Y. 2016. Dampak transmigrasi terhadap kehidupan sosial: studi sejarah masyarakat Timpeh Dharmasraya. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. 5 (1), 23-26.

Pagiola S, 2000. *Land use change in Indonesia.* https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/othr/papers/0405/0405007.pdf

Rachman C. dan Noviarini T, 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi program transmigrasi terhadap tingkat kesejahteraan penduduk transmigrasi. *Parameter* 3 (1), 51-66.

Rostiyati, A. 2012. Sakai Sambaian: Sistem gotong royong di Lampung Timur. *Patanjala Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*. 4 (1), 99-13.

Soekanto, S. 2014. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Garindo Persada.

Sugiyono. 2018. *Metode Kualitatif*. Bandung. ALFABETA.

Sukmana, O. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang. *Intrans Publishing.*